

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru adalah “pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, formal, dasar, dan menengah”. Dimana dalam undang-undang itu juga mempersyaratkan bagi guru untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat profesi serta kewajiban professional yang harus diemban yang pada gilirannya nanti akan memacu pada peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Demi mencapai peningkatan mutu pendidikan, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia. Dengan kata lain guna mencapai peningkatan mutu pendidikan hal tersebut bergantung pada penguasaan kompetensi guru.

Jika kita amati lebih jauh tentang realita kompetensi guru saat ini agaknya masih beragam. Danim, Sudarwan (2002) mengungkapkan bahwa “salah satu ciri

krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru.

Banyak sekali masalah-masalah dalam krisis pendidikan yang sangat beraneka ragam jenisnya dan sifatnyapun ada yang sangat sederhana dan ada juga yang sangat kompleks. Masalah yang dihadapi atau dialami tersebut, tidak jarang juga membutuhkan koordinasi dari suatu tim untuk mengatasinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan perlu adanya koordinasi yang komprehensif dan kontinue baik antar pejabat pendidikan, instansi pendidikan hingga ke masyarakat.

Masalah kependidikan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan, baik dikalangan pendidikan maupun di luar pendidikan. Kendatipun berbagai pandangan tentang masalah tersebut telah banyak dikemukakan oleh para pakar pendidikan, namun satu hal yang sudah pasti, bahwa masyarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan guru yang khusus berfungsi mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan terlatih dengan baik. Implikasi dari gagasan tersebut ialah perlunya dikembangkan program pendidikan guru yang serasi dan memudahkan pembentukan guru yang memiliki kompetensi profesional, serta dapat dilaksanakan secara efisien dalam kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia.

Sejarah kehidupan manusia telah membuktikan bahwa walaupun dalam kelompok manusia telah disepakati tata nilai yang harus dipedomani dalam

melakukan kegiatan tertentu, manusia selalu saja tata nilai tersebut tidak dapat dijalankan seoptimal mungkin. Hal ini jugalah yang melekat pada diri seorang guru walaupun telah ada aturan-aturan bagi seorang guru dalam menjalankan tugas utamanya, masih saja ada kesalahan yang terjadi didalamnya. Dalam hal ini, tidak dapat lagi disebutkan satu per satu ketidakmampuan guru untuk mempedomani tata nilai yang telah disepakati sebelumnya. Semua kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa pada hakekatnya guru itu tergolong individu yang memiliki kelemahan.

Sebagai individu yang memiliki kelemahan, guru juga selalu memerlukan pertolongan. Pertolongan yang dimaksud adalah pemberian bantuan kepada guru untuk menghindari dia melanggar tata nilai, membantu dia menyadari pelanggaran-pelanggarannya, dan juga membantu dia untuk tidak melakukan lagi pelanggaran atas tata nilai yang telah disepakati. Pemberian bantuan ini disebut dengan pengawasan. Pengawasan tidaklah semata-mata hanya pemberian bantuan atau pertolongan belaka, tetapi lebih dari itu. Pengawasan lebih ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia agar mau dan mampu menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan kelompoknya dan atau memenuhi kebutuhannya. Pengawasan pada awalnya dilaksanakan guna memantau ataupun memeriksa kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya.

Melalui pengawasan ini tampilan guru dipantau sedemikian rupa oleh pengawas atau penilik yang melibatkan kerjasama secara harmonis antara guru. Artinya guru diibaratkan sebagai bawahan yang harus tunduk pada apa dan bagaimana yang diperintahkan oleh pengawas. Sedangkan dalam pandangan modern pengawasan ditujukan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu

pengawasan dilakukan sebagai bantuan bagi guru dalam meningkatkan kualitas mengajar untuk membantu siswa agar lebih baik lagi dalam belajar. Walaupun demikian, dalam kenyataan yang ada, masih banyak guru beranggapan bahwa pengawasan indentik dengan inspeksi. Akibatnya timbullah tingkah laku seperti kaku, ketakutan pada atasan, tidak berani berinisiatif, bersikap menunggu instruksi, serta paranoid lainnya bagi para guru.

Untuk menghindari anggapan-anggapan negatif terhadap pengawasan, maka guru dituntut harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas utamanya dan bertanggung jawab guna tidak menimbulkan paranoid tersendiri pada guru dalam menjalankan tugas utamanya. Kompetensi yang dituntut bagi seorang guru disini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur Standar Pendidikan Nasional Bab VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 ayat 3, meliputi : 1) Kompetensi pedagogik, 2) Kompetensi Sosial, 3) Kompetensi kepribadian, dan 4) Kompetensi profesional". Dalam uraian ini dimaksudkan bahwa jabatan guru adalah jabatan professional yang mana tidak semua orang bisa menjabatnya, selain orang yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Jika kita telaah secara cermat tingkat tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan ialah terjadinya peningkatan secara kontinue terhadap perilaku pada diri anak didik maupun guru sebagai subjek yang berupa kompetensi professional, pedagogik, sosial dan kepribadian.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru terkhusus meningkatkan kompetensi professional guru, tidak terlepas dari peran serta kinerja pengawas sekolah selaku pimpinan pendidikan. Kompetensi professional dalam hal ini

meliputi kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya dalam membimbing peserta didik memperoleh kompetensi dalam bidangnya.

Pengawas dan guru memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan. Agar kompetensi guru dapat berjalan dengan baik, maka pengontrol dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini adalah pengawas. Pengawas adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan proses dan hasil belajar guna mencapai tujuan pendidikan. Pengawas diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah dibidang akademik (teknis pendidikan) dan bidang manajerial (pengelolaan sekolah).

Tetapi dewasa ini, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada beberapa lembaga PAUD dan melakukan wawancara kepada guru-guru PAUD yang ada di Desa Muliorejo tempat peneliti akan melakukan penelitian bahwa kenyataannya pengawas belum menjalankan kinerjanya dengan optimal seperti yang diamanatkan pada dirinya. Hal ini menurut beberapa guru bahkan pimpinan (kepala sekolah) PAUD di Desa Muliorejo pengawas tidak sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya dilapangan, dimana pengawas tidak datang pada setiap jadwal kunjungannya ke lembaga PAUD dalam rangka tugasnya, tetapi pengawas hanya melakukan tugasnya melalui via telepon guna menentukan tempat dimana bertatap muka atau berjumpa untuk meminta data secara tertulis yang diperlukan sebagai tugasnya tanpa langsung berkunjung ke lembaga PAUD itu sendiri.

Pengawas tidak pernah memberikan bimbingan kepada guru tentang beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru lewat kunjungan kelas sebagai observer untuk melihat guru melakukan kegiatan mengajar dikelas. Pengawas tidak melakukan tugasnya dalam bidang akademik (pendidikan atau pembelajaran) dan bidang manajerial (administrasi dan manajemen sekolah). Walaupun pengawas datang berkunjung, pengawas tidak pernah memberikan sarannya guna membimbing guru dalam mengembangkan kompetensi profesional. Sebaliknya pengawas hanya memaparkan kelemahan yang ada pada guru lembaga dengan melihat data tertulis yang dimintanya tanpa memberikan solusi bagaimana mengatasi kelemahan tersebut guna membangun kearah yang lebih baik lagi bagi guru dan lembaga PAUD yang dikunjungi dan terakhir pengawas tidak pernah memberikan motivasi guna merangsang semangat kerja guru PAUD dalam bekerja.

Bertitik tolak dari pandangan diatas peneliti tertarik menjadikan PAUD selingkungan Desa Mulioarjo sebagai objek penelitian tentang “Tanggapan Guru PAUD Terhadap Kinerja Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru PAUD di Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan (berkomunikasi) antara guru PAUD dengan pengawas PAUD di Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupten Deli Serdang.

2. Adanya kesenjangan antara sistem program kerja sekolah dengan jadwal kunjungan pengawas kesekolah di Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupten Deli Serdang.
3. Pengawas tidak menjalankan tugasnya dalam bidang akademik dan manajerial.
4. Tidak optimalnya pengawas menjalankan kinerja yang berdampak masih adanya guru yang belum profesional dalam menerapkan materi dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan anak didik.

#### **C. Batasan Masalah**

Dengan demikian yang menjadi batasan dari masalah dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang : “Tanggapan Guru PAUD Terhadap Kinerja Pengawas PAUD Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru PAUD di Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dan merupakan titik awal peneliti mengadakan penelitian. Masalah yang di temukan di lapangan perlu untuk dipecahkan. Berangkat dari latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa baik tanggapan guru PAUD terhadap kinerja pengawas PAUD dalam mengembangkan kompetensi profesional guru PAUD di Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

**E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan guru PAUD terhadap kinerja pengawas PAUD dalam mengembangkan kompetensi profesional guru PAUD di Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

**F. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, diharapkan dari hasil penelitian memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi pengawas agar lebih aktif untuk memberikan bantuan bagi guru dalam meningkatkan kualitas mengajar dalam proporsi yang positif.
2. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi profesional dalam mendidik dan mengajar anak didik.
3. Sebagai bahan masukan maupun perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan karya ilmiah pada kajian yang sama.